

Bupati Balangan Pantau Pengerjaan Ruang Isolasi Pasien Covid-19



<https://redkal.com/bupati-balangan-pantau-pengerjaan-ruang-isolasi-pasien-covid-19/>

Bupati Balangan H Ansharuddin bersama jajaran Muspida dan Dinas Kesehatan serta Gugus Tugas Covid-19 melakukan peninjauan serta memantau langsung pengerjaan pembangunan ruang isolasi Covid-19 di RSUD Balangan, Senin (18/5/2020).

Pengerjaan tujuh kamar ruang isolasi di RSUD Balangan khusus pasien Covid-19 tersebut dilaksanakan sejak satu bulan lalu menggunakan dana penangan Covid-19 sebesar Rp 600 juta.

Bupati Balangan H Ansharuddin mengatakan, peyediaan ruang isolasi ini untuk mempermudah penanganan pasien Covid-19. Sebab, RSUD Balangan belum memiliki ruangan isolasi standar.

“Sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah sudah sewajarnya menyediakan ruangan isolasi Covid-19. Kita lakukan pemantauan pengerjaan renovasi ruang isolasi ini untuk menyesuaikan dengan standar yang sudah ditentukan. Juga dibuat nyaman dan seagus mungkin,” jelas Bupati.

Dikatakannya, pengerjaan ruang isolasi ini sudah tahap penyelesaian dan diperkirakan akan selesai pada akhir Mei nanti. “Penambahan ruang isolasi ini juga untuk mengantisipasi kalau seandainya ada warga kita yang harus diisolasi lantaran Covid-19. Namun kita tetap berdoa semoga ruang ini tidak terisi,” sebutnya.

(Diringkas dari <https://redkal.com/bupati-balangan-pantau-pengerjaan-ruang-isolasi-pasien-covid-19/>)

Bupati Balangan juga berpesan agar ruang isolasi ini dibangun senyaman dan seagustus mungkin.

Sementara itu, Direktur RSUD Balangan, dr Ferry menyebutkan, ada 7 ruangan isolasi yang dibangun dan lokasi berada jauh dan terpisah dari ruang pelayanan kesehatan lain.

“Dengan adanya ruang isolasi khusus memudahkan tim medis kita melakukan penanganan pasien Covid-19,” ungkapnya.

Lanjutnya, pihaknya juga sudah menyiapkan tenaga medis yang siap bertugas ketika ruangan isolasi ini sudah selesai.

Kita berharap tidak ada kasus PDP atau positif di daerah kita namun kita harus mewaspadai Orang Tanpa Gejala (OTG) oleh karena itu kita telah melakukan langkah antisipasi ketika hal itu terjadi, salah satunya penyiapan ruang isolasi ini.

Di sela pemantauan ini, Ansharuddin juga melakukan pengecekan ketersediaan APD dan stok obat di RSUD Balangan yang sampai saat ini persediaan tersebut masih cukup untuk penanganan Covid-19.

(Diringkas dari <http://infopublik.id/kategori/nusantara/456689/bupati-ansharuddin-pantau-pembangunan-ruang-isolasi-pasien-covid-19>)

Sumber Berita:

1. <https://redkal.com/>, *Bupati Balangan Pantau Pengerjaan Ruang Isolasi Pasien Covid-19*, 18 Mei 2020.
2. <http://infopublik.id>, *Bupati Ansharuddin Pantau Pembangunan Ruang Isolasi Pasien Covid-19*, 18 Mei 2020.

Catatan:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Pasal 3 ayat (2) memungkinkan Pejabat Perbendaharaan untuk mencairkan anggaran dalam keadaan mendesak atau tidak dapat ditunda walaupun dana tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA. Namun, pencairan mendesak ini hanya terbatas untuk obat-obatan, alat kesehatan, sarana prasarana kesehatan, sumber daya manusia baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan, dan kegiatan lain berkaitan dengan penanganan Pandemi Covid-19.

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004).

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004).

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional Desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004).

Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004).

🌟 Struktur APBD

